

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

1. Untuk Perencanaan dari Pemerintah Desa Nainaban dalam mengelola dana desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nainaban sudah melakukan perencanaan, akan tetapi keterlibatan masyarakat yang masih kurang yang mengakibatkan usulan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa saja.
2. Selanjutnya, Pengorganisasian dari Pemerintah Desa Nainaban masih terlihat belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum efektifnya uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh para pengelola keuangan desa. Disamping itu masih banyak terdapat keterbatasan terutama masih lemahnya sumber daya manusia terutamaberkaitan dengan pengetahuan tentang manajemen administrasi atau pengelolaan keuangan.
3. Dalam hal Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Nainaban sudah terlaksana walaupun dalam pelaksanaan pembangunan belum terealisasi secara optimal dikarenakan dana desa banyak terpakai untuk membantu menunjang perekonomian masyarakat akibat dari pandemik virus covid-19. Dalam tahap ini pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat Desa Nainaban sendiri tidak sesuai dengan target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan pupuk dan pakan ternak, kurangnya ketrampilan Aparatur desa dalam menggunakan computer, belum dilakukannya kader desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa, kesadaran masyarakat untuk pengembangan tenun ikat menurun, dan belum ada pelatihan tentang program pengelolaan BUM Desa. Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Nainaban Tahun 2020 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan menjadi ukuran kinerja bagi pemerintah desa dan semua oemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi desa nainaban dalam kurun waktu yang telah direncanakan.
4. Kemudian dalam hal Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Nainaban masih belum berjalan dengan efektif, dimulai dari bukti pelaporan hingga pertanggungjawaban yang belum jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan desa sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa karena tidak dilakukan secara transparan atau secara terbuka kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan. Mengenai pengawasan dari BPD masih terbilang kurang efektif karena aturan yang mengatur tentang dana desa tidak dirancang atau dibuat oleh BPD.

5. Oleh sebab kegiatan pemberdayaan yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya, maka apa yang menjadi tujuan adanya program tersebut tidak terwujud. Seharusnya ketika merencanakan kegiatan pemberdayaan baik itu berupa pelatihan, terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengajukan apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak hanya itu, masyarakat pun juga dituntut untuk aktif dalam mengikuti setiap musyawarah dengan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya dan tidak hanya bersikap menerima saja.
6. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat sehingga target pemberdayaan ekonomi kreatif warga belum terpenuhi. Permasalahan utamanya adalah dalam mengadakan program pemberdayaan masyarakat merupakan prakarsa dari pemerintah Desa dan bukan atas dasar keinginan ataupun kebutuhan dari masyarakat sendiri. Sehingga rencana membangun usaha baik itu kelompok maupun individu dari hasil pelatihan pembuatan keripik buah pun tidak terlaksana. Selain itu partisipasi dari masyarakat yang masih pasif, yaitu bersikap menerima saja apa yang direncanakan dari pemerintah Desa dalam hal ini program pemberdayaan, sehingga kemauan masyarakat untuk mengembangkan hasil dari pelatihan pembuatan keripik buah pun tidak ada. Bahkan mereka merasa kurang percaya diri bila ingin membuka usaha sendiri dengan alasan takut jika tidak mendapat keuntungan. Selain itu juga dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Nainaban masih terfokus pada pembangunan fisik. Sementara itu fungsi pengawasan dari BPD juga tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Adisasmita, Rahardjo.(2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Ndraha, Taliziduhu. (1981) *Dimensi-dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta, Bina AKSARA
- Nurcholis, Hanif. (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Rozaki, Abdul. (2005)*Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE PRESS.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung,Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta,Citra Utama.
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sarman, Mukhtar. (2004). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Banjarmasin: Pustaka Fisip Universitas Lambung Mangkurat.
- Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.1
- Satori dan Komariah. (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta
- Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 1.
- UsmanHunaini, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, Bumi Aksara, 2008 h. 5.
- Ibid*, h. 70.
- Melayu Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.54 *Ibid*, h. 67.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta,PT. Gunung Agung.
- Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh,Reinforcement Action and Development.
- Widjaja, HAW . (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh* . Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada .
- Unlam, Fisip. 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin : Pustaka Banua.

JURNAL

Putra, Pratiwi, Suwondo (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212

Prasojo, Eko (2003) People And Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Ilmiah Publik, vol IV, No. 2, Maret-Agustus :10-24. Sugiono (2009).

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Desa

WEBSITE

Badan Pusat Statistik, (2013). Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia. *Badan Pusat Statistik* <http://www.bps.go.id>, diakses 13 November 2015.

Hernowo, B. (2010). Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan. *www. bappenas.go.id*, diakses 23 Oktober 2015.